

**KH. Abdullah Hasan,**  
Pengasuh PP. As-Salafiyah Mlangi, Yogyakarta  
dan Koordinator FSPP (Forum Silaturahmi Pesantren dan Petani)

## Jika Tidak Bergerak untuk Petani, NU Tinggal Mitos



Saat itu, warga NU dari berbagai daerah di tanah air berkumpul untuk membicarakan nasib NU yang semakin jauh terbawa arus politik praktis. Berbagai masalah yang melilit warga NU dibahas secara mendalam dalam sidang-sidang komisi. Seingat saya ada 9 komisi. Salah satunya adalah Komisi Pertanian dan Pertanahan. Nah, dari komisi inilah kemudian muncul sebuah rekomendasi yang mengamanatkan perlunya NU merawat sektor pertanian yang selama ini menjadi basis sosial-ekonomi warga NU. Sebagai salah satu bentuk ijtihad dalam merawat sektor pertanian sebagaimana amanat Mubes tersebut, maka pada tanggal 26 Desember 2004 bertempat di PP. Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta dideklarasikanlah sebuah wadah yang bernama Forum Silaturahmi Pesantren dan Petani atau yang biasa disingkat dengan FSPP. Jadi bisa dikatakan bahwa FSPP adalah anak kandung dari Mubes Warga NU Cirebon.

*Apakah Anda bisa menceritakan latar belakang berdirinya FSPP?*

Terus terang saja, FSPP sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari Musyawarah Besar warga NU yang digelar oleh warga NU pada tanggal 8-10 Oktober 2004 di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

*Siapa saja pendiri FSPP?*

Kalau mengacu pada Mubes Warga NU Cirebon, pendiri FSPP adalah semua warga NU yang hadir pada saat itu, karena FSPP adalah hasil dan rekomendasi

Mubes Warga NU Cirebon. Tetapi memang, secara teknis dapat dikatakan FSPP dimotori oleh peserta mubes yang tinggal di Yogyakarta dan sebagian kawasan Jawa Tengah. Di antara kita ada yang pengurus NU, kiai, gus-gus, santri, mahasiswa, aktifis LSM, dosen, dan tentunya para petani.

*Apa sebenarnya cita-cita yang diusung FSPP?*

Cita-cita kita tidak muluk-muluk, sederhana saja. Kami hanya ingin agar warga NU yang sebagian besar petani dan tinggal di pedesaan itu ada yang mene-mani, ada ruang berbagi informasi dan keluh kesah, serta tempat bermusyawarah antar warga NU, utamanya yang petani. Terus terang kita prihatin, mayoritas warga NU itu petani, tapi kita belum menemukan wadah untuk petani yang solid dan *mberkahi* (bermanfaat). Bahkan saya yakin mayoritas elit-elit NU sekarang ini dulunya juga anak para petani dengan berbagai profesi sampingannya. Tapi kenapa saat ini NU sebagai *jam'iyah* (organisasi) kurang serius menaruh perhatian dan kepedulian pada masalah pertanian? Padahal, petani NU dengan PERTANU (Persatuan Tani NU)-nya pernah jaya dan berjasa besar, serta menjadi ujung tombak NU dalam menghadapi hegemoni PKI atas tanah rakyat melalui BTI (Barisan Tani Indonesia)-nya. Bahkan PERTANU pada waktu itu menjadi badan otonom (banom) NU yang sangat disegani di mana-mana. Meskipun pada tahun 1973 oleh rezim Orde Baru PERTANU dipaksa melebur diri ke dalam HKTI (Himpunan Kerukunan Tani In-

donesia) yang mengakibatkan PERTANU mati, namun setidaknya banom tersebut pada Mukdamar Krapyak tahun 1989 pernah bereinkarnasi menjadi LP3NU. Sayangnya setelah menjadi LP3NU, gerakan pertanian di NU tetap mati suri. Hal ini berlanjut sampai Mukdamar Cipasung pada tahun 1994 dan mendapatkan nama baru, yaitu LP2NU. Kalau-pun tidak mati maka tidaklah salah jika dikatakan bahwa gerakan pertanian di NU belum menampakan geliatnya yang cukup signifikan apalagi dirasakan manfaatnya oleh warga nahdliyyin. Padahal, kalau kita mau membenahi kehidupan ekonomi warga NU, mau tidak mau sektor pertanian harus menjadi prioritas utama.

*Apa visi FSPP ke depan?*

Kita ingin dan sepakat untuk memperjuangkan sistem yang adil dan berpihak pada hajat hidup kaum tani dan masyarakat pedesaan, basis utama NU.

*Apa yang dilakukan FSPP untuk mewujudkan visi tersebut?*

Dalam rangka mencapai visi yang kita cita-citakan itu, FSPP merumuskan sejumlah misi. *Pertama*, mendorong terciptanya kebijakan yang memihak kepada nasib petani dan masyarakat pedesaan lainnya yang selama ini termarginalkan. *Kedua*, memperkuat kemitraan pesantren dengan petani melalui penguatan organisasi masyarakat, petani dan pesantren. FSPP berusaha mensinergikan kekuatan pesantren dengan petani dalam satu visi gerakan yang bisa memberdayakan keduanya. *Ketiga*, mengupayakan



terbangunnya sistem perdagangan pertanian yang adil dan tidak merugikan petani. Karena kalau kita perhatikan sistem perdagangan kita selama ini, terutama menyangkut pertanian, sama sekali tidak memihak pada petani. Hampir semua produk pertanian yang kita makan itu adalah hasil impor. Padahal, kalau pemerintah mau sungguh-sungguh menciptakan sistem perdagangan yang memihak pada petani, saya yakin impor beras, kedelai, gula, dan sebagainya tidak perlu dilakukan. Tapi nyatanya tidak demikian. Pemerintah lebih mendahulukan impor karena pemerintah dan para kroninya bisa mendapat *fee* dari situ. Apalagi komoditas pertanian yang diimpor ke negeri kita ini nyaris bebas bea masuk. Oleh sebab itu, FSPP memandang bahwa sistem perdagangan yang adil dan memihak pada petani memang betul-betul perlu diperjuangkan. Nah, untuk memperjuangkan itu, kita berupaya mengajak pesantren-pesantren yang ada, tentunya NU juga, untuk bersama-sama merawat basis ekonomi warga NU ini.

*Mengapa Anda begitu yakin bisa mengajak pesantren dalam kerja-kerja pemberdayaan petani ini, bukankah pesantren saat ini lebih tertarik ke politik?*

Kepercayaan saya pada pesantren masih sangat kuat. Siapa lagi yang akan kita percaya kalau bukan pesantren? Siapa lagi yang akan mempercayai pesantren kalau bukan kita-kita? Jadi, meskipun pesantren sekarang ini banyak yang limbung dan tidak fokus akibat kepentingan politik sesaat, tapi saya tetap

optimis pesantren masih bisa diajak untuk berbuat sesuatu yang lebih besar dan mulia untuk umat. Di samping itu, dalam pandangan kita, pesantren masih memiliki posisi tawar yang cukup besar dalam masyarakat, khususnya warga NU. Meskipun kuatnya posisi tawar tersebut terkadang tidak disadari, atau disadari tapi (pada momen-momen tertentu) cenderung tidak dihargai. Padahal, bila posisi tawar pesantren itu dijadikan sebagai kekuatan kritis dan transformatif, maka hasilnya akan sangat dahsyat dan mulia. Pesantren merupakan modal sosial yang membumi, kokoh dan khas. Jangan lupa, hanya NU yang punya kedekatan dengan pesantren. Karena NU itu anak kandung pesantren. Pesantren tidak hanya giat dalam proses-proses pembelajaran moral dan intelektual, tapi juga ekonomi.



bp0.blogger.com

*Selain modal sosial, potensi apa yang dimiliki pesantren?*

Sebagian besar lokasi pesantren yang berada di pedesaan tentu punya nilai strategis tersendiri dalam upaya pemberdayaan petani. Tiap pesantren memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas apa yang terjadi di sekitarnya, termasuk santri dan wali santri yang rata-rata petani. Orang 'alim yang baik adalah orang 'alim yang tidak hanya 'alim dalam persoalan agama, tapi juga peka dan memahami persoalan dan kemaslahatan umatnya.

Konsekwensi pesantren yang memfokuskan diri pada dakwah agama, membangun proses moral dan intelektual, adalah turut aktif menjaga persoalan-persoalan yang dapat mengancam fokus pesantren. Antara *ghayah* (tujuan) dengan *wasilah* (sarana) merupakan bagian integral, meskipun keduanya berbeda. Ini selaras dengan kaidah fiqih, *ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib*. Nah, salah satu persoalan yang mendukung dan menjaga fokus pesantren adalah persoalan ekonomi. Lebih dari itu, dalam persoalan kehidupan, ekonomi itu bagian dari "*al-dharuriyat*" (sesuatu yang kalau tidak dijaga akan hancur). Tidak berlebihan kalau kiranya Rasulullah pernah berujar *Kadal faqru an yakuna kufuran*. Dengan demikian, kiai, nyai, santri dan segenap komunitas pesantren tidak punya alasan untuk acuh tak acuh terhadap persoalan ekonomi, dalam hal ini pertanyaan.

Mas, jangan salah ya. Saya tidak sedang mengatakan kiai harus turun ke sawah atau melakukan operasi pasar. Yang ingin saya katakan adalah posisi tawar kiai

dan pesantren itu harus digunakan sebagai *palu godam* yang siap menghancurkan batu hitam berupa sistem sosial dan sistem regulasi yang tidak memihak kepada para petani khususnya, dan rakyat miskin pada umumnya. Dari sinilah diharapkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara luas terwujud, termasuk di dalamnya proses-proses dakwa agama serta pembelajaran moral dan intelektual yang ada di dalam pesantren.

*Apa benar posisi tawar pesantren sekuat itu?*

Ya jelas, Mas. Coba perhatikan, mulai pemilihan kepala dusun sampai pemilihan presiden semua membuka peluang untuk kiai dan pesantren turut "bermain". Semua calon hampir dapat dipastikan, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, memanfaatkan pesantren dan kiaiinya. Dari mulai minta *pangestu* sampai pengerahan massa. Nah, kalau dukungan politik saja pesantren bisa memberikan, *masak* dukungan terhadap perbaikan nasib jama'ahnya, termasuk petani tidak dilakukan? *Na'udzu billah tsumma na'udzu billah*.

*Dalam konteks pemberdayaan petani, apa kelemahan pesantren?*

Setidaknya ada tiga problem. Pertama, saat ini, pesantren, baik kiaiinya maupun santrinya, hampir 24 jam waktunya dihabiskan untuk kegiatan internal pesantren. Untuk mengalihkan 2 jam saja kegiatan di luar pesantren misalnya, dibutuhkan keberanian, perencanaan, dan strategi yang matang. Karena ini menyangkut tradisi di pesantren yang



telah mapan. Untuk memulainya butuh keikhlasan, kesabaran, keuletan, kreatifitas, serta waktu yang panjang. *Kedua*, sedikit sekali –untuk tidak mengatakan langka- informasi tentang pemberdayaan masyarakat masuk ke pesantren-pesantren. Kekurangan ini makin sempurna dengan adanya pesantren-pesantren yang memang menutup diri dari kegiatan di luar. *Ketiga*, pesantren yang meluangkan waktu untuk kegiatan di luar lebih banyak yang memilih ruang politik praktis. Ruangan para politisi lebih nyaman dan menggoda ketimbang sawah atau laut. Anda tahu kan alasan lebih dalam kenapa banyak kiai yang memilih bergaul dengan para politisi ketimbang para petani? Jangan salah Mas, bukan berarti saya sedang tidak percaya dengan kiai yang politisi, kiai yang *gaul* dengan politisi, dan politisi. Saya yakin, di antara mereka masih ada yang baik, jujur, adil, membela rakyat kecil.

#### *Apa yang telah dilakukan FSPP?*

FSPP itu terbagi dalam beberapa kelompok kerja (pokja). Ada Pokja Advokasi dan Pemberdayaan, Pokja Pengembangan Ekonomi, Pokja Media dan Jaringan, serta Pokja Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan. Masing-masing pokja memiliki otonomi yang cukup besar dalam mengembangkan programnya, tetapi tetap dalam satu kesatuan gerak di bawah payung FSPP. Secara riil, kita belum banyak melakukan amal saleh. Dalam 4 tahun ini, FSPP baru melakukan pertemuan-pertemuan warga di wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa tengah (Klaten, Kebumen,

Puroworejo, dan Magelang). Kita bekerja berbasis di kecamatan. Di tiap kabupaten, setidaknya ada 3 kecamatan. Jadi, kita minimal punya 29 wilayah atau mitra kerja. Dalam pertemuan itu, selain silaturahmi, konsolidasi, berbagi informasi, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan membuat pupuk kandang, dan penyuluhan-penyuluhan teknis pertanian lainnya. Kita juga mengadakan pelatihan CO (*community organizer*) bagi santri-santri senior dan alumni pesantren yang tersebar di beberapa wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kita berharap santri-santri senior yang ada di pesantren serta alumni pesantren itu bisa menjadi pelopor dan penggerak, bukan saja di bidang keagamaan, melainkan juga di bidang ekonomi pedesaan, khususnya di sektor pertanian. Di Gunung Kidul (DIY), kita punya *pilot project*. Di daerah gersang ini kita memiliki beberapa petak tanah wakaf untuk dijadikan pesantren berbasis pertanian. Selain itu, kita sedang melakukan uji coba pertanian organik di salah satu lahan milik jaringan FSPP di kawasan Bantul.

*Pada tahun 2005 FSPP menggelar bahtsul masail tentang pertanahan yang diikuti para kiai dan santri dari Jawa, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Apa yang melatarbelakangi bahtsul masail ini?*

Keresahan bersama mengenai isi Perpres 36 th 2005. Regulasi yang ada dalam perpres tersebut tidak “*qath’i*”, bisa dimaknai macam-macam sesuai dengan kehendak penguasa. Nah, kita tahu



dok. FSPP/Ngatiar

penguasa saat ini begitu mesra dengan para pedagang besar. Kita melihat di sana rawan penyelewengan. Perpres tersebut menyimpan ketidakadilan dan kelaliman.

#### *Apa kendala FSPP?*

Kendala pertamanya adalah, aktivitas di FSPP merupakan aktivitas *samben*, sampingan. Kita ini ada yang dosen, kiai, santri, mahasiswa. Kita susah sekali untuk bertemu. Jarang sekali kita bertemu secara utuh. Tapi untungnya semuanya masih punya komitmen, meski hanya lewat SMS, atau bahkan hanya doa..hahaha... Tapi ini serius, komunikasi yang kecil dan ringan lewat SMS ini penting sekali.

Lewat SMS-lah kita bisa berkumpul, mengadakan pertemuan-pertemuan misalnya di pelosok Desa Tlepek Kecamatan Semin, Gunung Kidul. Bahkan, karena SMS, ditambah bensin 2 liter kita bisa menerbitkan buletin sampai 3 edisi. Meskipun sekarang terhenti. Mudah-mudahan saja akan terbit lagi. Saat itu disitribusinya *numpang* pada sebuah LSM di Yogyakarta.

Kendala lain, kita belum banyak punya pengalaman. Untuk itu, kita akan terus mencari dan belajar kepada orang atau lembaga yang sudah berpengalaman. Kita juga terbuka terhadap siapa saja dari kelompok mana saja untuk berjejaring dan



bekerja sama. Syaratnya *halalan thayiban*, masalah, dan saling menjaga independensi masing-masing.

*Bagaimana dengan dana FSPP?*

Anda *marxis* juga ya, *kok* tanya soal dana? Hahaha... Memang, selama ini banyak orang yang bertanya-tanya dari mana pembiayaan FSPP. Terus terang, dalam menggerakkan FSPP ini selama kurang lebih 4 tahun, kami membiayainya dengan cara *bantingan*. Setiap ada acara atau rapat, kita menyediakan semacam kotak infaq gerakan. Karena acara kita

Jadi kalau kita mengadakan pelatihan, pelatihan pupuk organik di Magelang misalnya, ya hampir semua kebutuhan transport ditanggung sendiri oleh masing-masing peserta. Yang tidak punya motor *nebeng*. Ya, kita saling membantulah. Fasilitatornya juga sama, modal sendiri, tidak diberi transport dan honor. Sementara tempat dan konsumsi ditanggung tuan rumah. Beres kan? Butuh dana apa lagi? Nah, baru kalau kita mau menyelenggarakan acara yang besar, misalnya *bahtsul masail*, kita baru pro aktif

mencari dana ke donatur. Donaturnya ya kita-kita sendiri, alias *bantingan* tadi. Resikonya FSPP berjalan sangat lamban.

*Kenapa Anda tidak masuk LP2NU?*

Sejak 2007 saya menjadi salah satu wakil ketua di PWNU DIY, membidani pertanian. Sekarang para aktivis FSPP juga jadi pengurus PW LP2NU DIY. Kini, FSPP dan LP2NU DIY bersinergi. Ya, ada ke-

lebihan dan kekurangan *sih*, tapi sampai hari ini nyaman-nyaman saja, lebih banyak positifnya ketimbang negatifnya. Yang penting bagi kita saat ini adalah, NU, baik secara *jam'iyah* (organisasi, struktural) maupun *jama'ah* (komunitas, kultural), *me-rembug* dan bergerak untuk petani, nelayan, buruh, pesantren, dan budaya. Jika tidak, NU tinggal mitos.❖



dok. FSPP/Ngatiar

kebanyakan di pesantren, maka kalau sudah menyangkut konsumsi, seringkali ditanggung oleh kiai pesantren yang menjadi tuan rumah tersebut. *Toh* sebenarnya kita itu tidak butuh banyak biaya *kok*. *Lha wong* semua penggiatnya mau tidak ada yang dibayar. Ikhlas atau tidak, itu urusan Allah kan? Yang tidak ikhlas dosanya ditanggung sendiri. Hahaha.....